

PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR DI KABUPATEN DAIRI

Samuel Kevin Sinamo

NPP 31.0090

Asdaf Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: 31.0090@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Sulthon Rohmadin, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The potential danger of landslides in Dairi Regency is at a moderate level. Landslide disasters continue to occur in Dairi Regency up to the present. The provision of public services in disaster management must be carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) as effectively as possible. **Objective:** This research aims to determine the capacity, constraints, and efforts of the BPBD of Dairi Regency in responding to the potential landslide disasters in Dairi Regency, thus requiring an analysis of each indicator. **Method:** This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data used are primary and secondary data. In collecting data, purposive sampling technique is used, and observations, interviews, and documentation are conducted. **Results/Findings:** Based on the data analysis, it can be seen that the capacity of the BPBD of Dairi Regency in landslide disaster mitigation is not yet optimal. **Conclusion:** This is due to the numerous shortcomings experienced by the BPBD in each indicator. **Keywords:** Landslide, BPBD capacity, disaster mitigation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Potensi bahaya tanah longsor Kabupaten Dairi memiliki potensi tingkat sedang. Kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Dairi masih terus terjadi hingga saat ini. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kebencanaan harus dilakukan oleh BPBD dengan sebaik mungkin. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas organisasi BPBD Kabupaten Dairi dalam menyikapi potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Dairi, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap setiap indikatornya. **Metode:** Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan pengumpulan data, digunakan teknik observasi, pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. **Hasil temuan:** Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa kapasitas BPBD Kabupaten Dairi dalam mitigasi bencana tanah longsor belum maksimal. **Kesimpulan:** Hal ini karena banyaknya kekurangan yang dialami BPBD pada setiap indikatornya. **Kata kunci:** Tanah longsor, kapasitas BPBD, mitigasi bencana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Dairi merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang rawan terhadap berbagai bencana alam. Dengan wilayah seluas 191.625 hektare, sebagian besar wilayah

Kabupaten Dairi terletak di dataran tinggi dan berbukit-berbukit dengan kemiringan yang bervariasi yang membuatnya memiliki iklim hujan tropis. Dengan tambahan curah hujan yang cukup tinggi, membuat Kabupaten Dairi memiliki ancaman bencana longsor yang sering terjadi setiap musim hujan (Sembiring, Rauf, & Aththorick, 2023). Karakteristik topografi, geologi, dan klimatologi Kabupaten Dairi menjadikannya sebagai salah satu wilayah di Sumatera Utara yang sangat rawan terjadi bencana longsor (Kurniawan, 2008). Salah satu buktinya adalah kejadian bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Dairi pada April lalu, walaupun tidak mengalami kerusakan yang fatal namun bencana yang terjadi sebanyak 7 bencana longsor. Bencana longsor di Kabupaten Dairi disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari BNPB juga, bencana longsor merupakan bencana paling banyak kedua yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022. Kemudian, bencana longsor juga merupakan bencana alam yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti curah hujan yang tinggi, aktivitas geologi tanah, erosi, dan juga tindakan manusia yang dapat merusak lingkungan. Berdasarkan data dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari BNPB, pada tahun 2022 terjadi 21 bencana tanah longsor di Kabupaten Dairi. Berikut adalah data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Dairi yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Data Kejadian Bencana Tahun 2022 Kabupaten Dairi

No.	Bencana	Jumlah Kejadian
1.	Banjir	3
2.	Tanah Longsor	21
3.	Banjir dan Tanah Longsor	1
4.	Puting Beliung	12
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	8

Sumber: DIBI BNPB 2022

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa bencana tanah longsor menjadi salah satu ancaman yang sangat serius bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, tindakan pencegahan sampai dengan penanggulangan bencana alam harus dilakukan oleh seluruh pihak, terutama pemerintah. Sebagaimana disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Penanggulangan tersebut meliputi tindakan mitigasi risiko, perlindungan masyarakat, sampai dengan pemulihan atau rehabilitasi. Sebagai negara yang memiliki wilayah sangat luas, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pusat dan lembaga daerah. Pada lingkup daerah, penanggulangan bencana diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan turunan dari lembaga pemerintah Badan Nasional Penanggulangan Nasional (BNPB). Kemudian BPBD juga terdiri dari dua tingkat, yaitu BPBD tingkat provinsi dan BPBD tingkat kabupaten/kota. Kedudukan serta tugas dan wewenang BPBD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah, BPBD harus memiliki kapasitas yang mumpuni. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kajian kapasitas suatu daerah merupakan salah satu cara strategis untuk menyusun rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Seiring perkembangan zaman,

kapasitas lembaga BPBD harus terus mengikuti dinamika di masyarakat. Maka dari itu, BPBD memerlukan adanya pengembangan atau peningkatan kapasitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi bencana di daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

BPBD Kabupaten Dairi masih mengalami kekurangan yang signifikan. Sumber daya yang dimiliki saat ini belum mencapai tingkat yang diinginkan, terutama dalam hal sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur. BPBD Kabupaten Dairi menghadapi tantangan terkait jumlah dan kualitas personilnya. Jumlah personil yang tersedia di BPBD Kabupaten Dairi masih kurang, mengingat luasnya wilayah yang harus mereka cakup. Selain itu, dari segi kualitas, BPBD Kabupaten Dairi juga belum memiliki personil yang memiliki keahlian dan kualifikasi yang memadai, hal ini karena rekrutmen pegawai yang dilakukan tidak menuntut pegawai baru dengan keahlian khusus. Permasalahan selanjutnya, BPBD Kabupaten Dairi kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana. Saat ini infrastruktur yang dimiliki BPBD ada tapi masih terbatas. Secara umum keterbatasan BPBD Kabupaten Dairi berhubungan dengan keterbatasan anggaran. Hal ini karena anggaran BPBD Kabupaten Dairi yang terbatas membuat BPBD belum mampu secara maksimal dalam menyiapkan diri ataupun masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. Untuk itu BPBD Kabupaten Dairi terus berbenah dalam administrasi dan perencanaan anggaran.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti sekarang dalam melakukan suatu penelitian sehingga memperoleh relevansi terhadap judul yang akan diteliti tentang Pengembangan Kapasitas Organisasi BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Longsor Di Kabupaten Dairi. Berikut adanya beberapa dari Penelitian yang memiliki kaitan dengan Penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian dari Arifa, K., & Manurung, R. K. (2022). dengan judul “Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun”. Penelitian ini mendeskripsikan kapasitas BPBD Kota Medan dalam menjalankan program Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun.
2. Penelitian dari Sitorus, Y. L. M., Nurmaningtyas, A. R., Usman, S., & Yanthy, N. O. (2021). dengan judul “Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tolikara”. Penelitian ini mengukur peningkatan kapasitas daerah Kabupaten Tolikara dalam menanggulangi bencana yang memerlukan adanya peningkatan kapasitas pada beberapa pemangku kepentingan, seperti salah satunya adalah BPBD.
3. Penelitian dari Surbakti, I. O. B., & Manurung, R. K. P. (2023). dengan judul “Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo dalam Penanganan Rumah Relokasi Siosar Tahap I”. Penelitian ini menjelaskan tentang kapasitas BPBD Karo dalam menangani Rumah Relokasi Siosar Tahap I.
4. Penelitian dari Rahman, A. Z. (2017). dengan judul “Kapasitas Daerah Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor”. Penelitian ini mendiskripsikan kapasitas Kabupaten Banjarnegara dalam penanggulangan bencana tanah longsor dan mengetahui upaya peningkatan kapasitas Kabupaten Banjarnegara dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
5. Penelitian dari Hapsari, A. M., & Djumiarti, T. (2016) dengan judul “Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)”. Penelitian ini menjelaskan tentang kelembagaan organisasi BPBD Kabupaten Jepara dalam penanggulangan bencana dan melihat perlu adanya

peningkatan sumber daya, struktur organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

6. Penelitian dari Takda, A., Irsan, L. M., Harudu, L., Hidayat, A., Anas, M., & Hastuti, V. (2022) dengan Judul “Penguatan kapasitas Desa Batu Ganda dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor” penelitian ini berfokus pada penguatan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
7. Penelitian dari Nunung, A. (2020) dengan judul “Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sumedang Jawa Barat” penelitian ini berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor. yang merupakan alat ukur yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko bencana di wilayah Sumedang.
8. Penelitian dari Elyana, E., & Marom, A. (2017) dengan judul “Kapasitas BPBD Kabupaten Blora Dalam Penanggulangan Bencana Daerah” penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora dalam penanggulangan bencana daerah dan mengetahui kendala-kendala yang ada di BPBD Blora dalam penanggulangan bencana.
9. Penelitian dari Manullang, A., & Maesaroh, M. (2019). dengan judul “Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Semarang” Penelitian ini menganalisis Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang dan Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Semarang.
10. Penelitian dari Puri, D. P., & Khaerani, T. R. (2017). dengan judul “Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Purworejo” penelitian ini berfokus merumuskan strategi mitigasi bencana tanah longsor. Menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) analisis lingkungan strategis yang ada dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu berfokus pada peningkatan sumber daya yang tersedia pada organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi. Penelitian ini didasari oleh teori pengembangan kapasitas (*capacity buiding*) untuk melihat bagaimana peningkatan kapasitas lembaga BPBD Kabupaten Dairi dalam menangani bencana longsor yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. penelitian ini akan menganalisis pengembangan kapasitas organisasi BPBD Kabupaten Dairi berdasarkan dua dimensi yaitu sumber daya dan Manajemen

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas organisasi BPBD Kabupaten Dairi dalam menanggulangi bencana longsor.

II. METODE

Penelitian ini didasari oleh teori pengembangan kapasitas (*capacity buiding*) untuk melihat bagaimana peningkatan kapasitas lembaga BPBD Kabupaten Dairi dalam menangani bencana longsor. Analisis terkait pengembangan kapasitas organisasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk merumuskan strategi lebih lanjut dalam melakukan pengembangan kapasitas organisasi. Analisis tersebut juga dapat menjadi salah satu fase awal dalam melakukan pengembangan organisasi. Fase pengembangan organisasi sendiri terdiri dari lima

fase, yaitu sebagai berikut: (a) Mendeteksi masalah (b) Menemukan diagnosis (c) Analisis (d) Merancang intervensi dan memimpin perubahan (e) Mengadakan evaluasi dan pelebagaan perubahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang berfokus berdasarkan kepada Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kapasitas Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua segi, yaitu kuantitas dan kualitas. Kualitas sumber daya manusia seharusnya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses yang teratur dalam meningkatkan kemampuan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Ini mencerminkan kesungguhan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Jumlah pegawai administrasi yang memiliki status PNS di BPBD Kabupaten Dairi hanya sebanyak 22 orang. Jumlah ini dianggap masih kurang memadai untuk mengelola organisasi di wilayah Kabupaten Dairi yang luas serta memiliki potensi bencana yang tinggi. Dari data tersebut juga terlihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi memiliki total 25 dengan status Tenaga Harian Lepas, dan sementara itu untuk tenaga ahli atau yang sudah pernah mendapatkan diklat baik tingkat pusat maupun provinsi belum dilakukan dengan efektif.

2. Sarana dan Prasarana

BPBD Kabupaten Dairi, secara umum, memiliki infrastruktur yang cukup baik. Meskipun BPBD ini belum memiliki kantor permanen, mereka saat ini menempati bangunan yang disewa dari pihak lain. Bangunan yang digunakan sebagai kantor BPBD ini dalam kondisi yang layak dan dilengkapi dengan gudang logistik yang cukup besar. Hal ini tidak menjadi hambatan besar bagi BPBD Kabupaten Dairi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, terutama dalam bidang penanggulangan bencana. Sementara dalam melaksanakan tugasnya BPBD memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dimana tindakan yang ditetapkan oleh BPBD untuk memastikan bahwa pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat mencapai tingkat minimum yang memadai. Ini termasuk aspek-aspek seperti perencanaan penanggulangan bencana, pemantauan dan evaluasi risiko, koordinasi tanggap darurat, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta pemulihan pasca-bencana. SPM BPBD bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas tanggap bencana, serta mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

3. Anggaran dan Keuangan

BPBD Kabupaten Dairi didukung oleh alokasi anggaran yang diarahkan pada indikator dan tindakan yang akan dicapai. Anggaran pada BPBD disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana, kemudian dijabarkan dalam bentuk indikator pada Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dijadikan sebagai rencana kontingensi. Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana didasarkan pada indikator aksi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian tujuan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Anggaran yang diperoleh BPBD Kabupaten Dairi tergolong sedikit mengingat luasnya wilayah Kabupaten Dairi. Keterbatasan anggaran ini membuat BPBD Kabupaten Dairi kesulitan dalam meningkatkan

anggaran karena terdapat penolakan saat pengajuan anggaran. Situasi ini disebabkan oleh keterbatasan APBD Kabupaten Dairi, yang harus membagi anggaran sesuai dengan prioritas.

4. Teknologi

Dalam upaya mempermudah kerja di bidang penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Dairi memanfaatkan frekuensi radio sebagai alat komunikasi. Penggunaan teknologi ini adalah bentuk pemanfaatan kemajuan dalam komunikasi, yang memudahkan pertukaran informasi antara masyarakat atau antar pegawai BPBD itu sendiri. Frekuensi radio dianggap efisien dalam memancarkan sinyal komunikasi dan lebih ekonomis daripada penggunaan telepon genggam. Meskipun perawatan radio komunikasi relatif mudah dan sederhana, ketersediaan alat komunikasi di BPBD Kabupaten Dairi dalam keadaan rusak berat dan belum mencapai tingkat ideal yang dibutuhkan dalam situasi kebencanaan.

3.2 Manajemen

1. Strategi Kepemimpinan

Dalam sebuah organisasi, struktur hierarki sangatlah penting, di mana terdapat sosok pemimpin yang memegang peranan kunci. Kepemimpinan dalam organisasi menjadi faktor krusial karena pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab yang luas dalam mengelola organisasi tersebut. Dalam konteks kepemimpinan di organisasi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dairi telah berhasil menjadi figur yang dihormati oleh anggota BPBD Kabupaten Dairi. Kepala Pelaksana BPBD selalu menekankan pentingnya disiplin kepada anggota BPBD. Hal pertama yang penting adalah memiliki pemahaman yang kuat terhadap struktur organisasi BPBD serta membangun hubungan yang harmonis antara anggota BPBD Kabupaten Dairi. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan dan tugas yang diberikan. Selain karena peran penting dalam implementasi visi dan misi, seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi dan memberdayakan anggota dengan umpan balik yang membangun.

2. Program dan Proses Manajemen

Manajemen program berfokus pada produksi dan penyampaian layanan kepada pelanggan atau kelompok sasaran yang dituju. Sementara itu, manajemen proses berfokus pada pengelolaan sumber daya dan proses internal organisasi serta pengembangan program yang ada. Secara umum, manajemen program dan manajemen proses ini terkait erat dengan kegiatan perencanaan dan pemrograman, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan komunikasi. Program-program yang dirancang oleh BPBD Kabupaten Dairi mencakup semua jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Tentu saja, program-program ini diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko yang ada pada masing-masing bencana. Bencana tanah longsor di Kabupaten Dairi diklasifikasikan sebagai risiko tinggi, melihat topografi Kabupaten Dairi yang mayoritas berbukit-bukit atau bergunung-gunung menjadi faktor utama.

3. Relasi Antar Bidang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi menjalin kerja sama dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi, mengingat kebutuhan operasional organisasi yang terkadang terbatas. Dalam konteks kebencanaan, seperti yang dibahas dalam tulisan ini mengenai bencana tanah longsor, sangat jelas bahwa masalah bencana adalah sesuatu yang kompleks. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Dairi, baik itu dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, seharusnya dapat diatasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama ini dapat diperluas ke berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dunia akademis, media, dan masyarakat, sesuai dengan prinsip pentahelix dalam konteks kebencanaan.

3.3 Kendala dan Upaya dalam Pengembangan Kapasitas BPBD

Keterbatasan personil membuat BPBD kesulitan dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan dengan optimal. Selain itu, terbatasnya anggaran juga membatasi jangkauan kegiatan, sejalan dengan ketersediaan dana yang ada. Selain itu, biaya operasional yang besar dalam setiap kegiatan juga menjadi faktor pembatas yang membuat pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara maksimal. Kapasitas secara umum BPBD Kabupaten Dairi mengalami kendala terkait dengan ketersediaan anggaran yang terbatas dari pemerintah setempat. Kendala ini dimulai dari perencanaan yang mungkin belum matang secara optimal oleh BPBD Kabupaten Dairi. Selain itu, terdapat penolakan anggaran dari DPRD yang memandang kegiatan yang diajukan belum menjadi prioritas. Hal ini juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang terbatas dari pemerintah Kabupaten Dairi yang harus dibagi secara proporsional sesuai dengan prioritas yang ada. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, BPBD Kabupaten Dairi berfokus pada penyusunan anggaran tahun berikutnya yang didukung oleh data-data penting untuk memperkuat dasar pengajuan anggaran. Administrasi dan pembukuan terus diperbaiki dan disempurnakan agar usulan anggaran yang diajukan pada tahun berikutnya menjadi lebih kuat. Kerja sama dengan pihak lain juga dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi dalam upaya mitigasi terhadap bencana tanah longsor, mengacu pada teori Douglas Norton (2003) yang menjadi temuan utama dalam penelitian yaitu: (a) Dalam konteks sumber daya, BPBD Kabupaten Dairi masih mengalami kekurangan yang signifikan (b) Pembahasan mengenai kapasitas infrastruktur maupun teknologi menggambarkan bahwa BPBD Kabupaten Dairi memiliki keterbatasan pada kedua hal tersebut (c) BPBD Kabupaten Dairi kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana (d) kepemimpinan maupun manajemen organisasi telah dilakukan dengan baik. (e) Secara umum keterbatasan BPBD Kabupaten Dairi berhubungan dengan keterbatasan anggaran. Dan hasil temuan yang didapat sama dengan yang diteliti oleh Khairunnisa Arifa dan Rudi Kristian Manurung (2022).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan wawancara dengan informan, observasi, dokumentasi, dan analisis, terkait dengan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi dalam upaya mitigasi terhadap bencana tanah longsor, dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas BPBD Kabupaten Dairi dalam hal ini masih belum optimal.

Douglas Norton (2003) mengacu pada dua dimensi kapasitas, yaitu kapasitas sumber daya dan kapasitas manajemen, yang menjadi dasar dalam penilaian.

a. Dalam konteks sumber daya, BPBD Kabupaten Dairi masih mengalami kekurangan yang signifikan. Sumber daya yang dimiliki saat ini belum mencapai tingkat yang diinginkan, terutama dalam hal sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur. menuntut pegawai baru dengan keahlian khusus. Disamping itu pegawai yang telah bekerja masih kesulitan untuk mengikuti pelatihan baik karena faktor internal seperti keterbatasan anggaran, maupun faktor eksternal seperti jarang sekali pihak lain mengadakan pelatihan bagi pegawai. Menyikapi hal tersebut BPBD Kabupaten Dairi berusaha untuk menjaga kemampuan pegawai dengan disiplin yang ketat, latihan, serta simulasi mandiri untuk mempertahankan kualitas pegawai. BPBD Kabupaten Dairi terus berkoordinasi dengan pihak lain terkait pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Dairi.

Pembahasan mengenai kapasitas infrastruktur maupun teknologi menggambarkan bahwa BPBD Kabupaten Dairi memiliki keterbatasan pada kedua hal tersebut. BPBD Kabupaten Dairi kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana. Saat ini infrastruktur yang dimiliki BPBD sudah ada tapi masih terbatas. Infrastruktur tersebut tentunya sangat berarti bagi BPBD dalam kesiapan menghadapi bencana. Adapun kendala pada

infrastruktur maupun teknologi tersebut diakibatkan karena infrastruktur tersebut sudah menua dimana semakin lama kualitasnya menurun sehingga perlu dilakukan peremajaan. Selain itu kendala yang dihadapi juga pada perbaikan infrastruktur yang rusak berat seperti kendaraan yang tidak masuk dalam anggaran perawatan.

b. Dilihat dari segi manajemen, baik kepemimpinan maupun manajemen organisasi telah dilakukan dengan baik. Secara umum keterbatasan BPBD Kabupaten Dairi berhubungan dengan keterbatasan anggaran. Hal ini karena anggaran BPBD Kabupaten Dairi yang terbatas membuat BPBD belum mampu secara maksimal dalam menyiapkan diri ataupun masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu yang sangat singkat dan data belum terkumpul secara maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)

Peneliti berharap bahwa dalam penelitian kedepannya yang mengambil fokus masalah yang lebih luas dan lokasi yang sama agar mampu untuk melakukan penelitian secara komprehensif dan mendalam dari setiap aspek yang terkait peningkatan Kapasitas Organisasi BPBD Kabupaten Dairi, karena hasil penelitian ini masih terlalu awal dan belum dapat dikatakan maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu peneliti menyusun penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Douglas Norton, Anastasia Alexaxi. et all, 2003, Evaluating Capacity Development, ISNAR (international service for National Agricultural research), Netherland

Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.

Simangunsong, Fernandes. 2021. Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Bandung: Alfabeta

B. JURNAL

Arifa, K., & Manurung, R. K. (2022). Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) Di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 355-364. [Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah \(BPBD\) Kota Medan Dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana \(KELTANA\) Di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun | Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik \(unived.ac.id\)](#)

Elyana, E., & Marom, A. (2017). Kapasitas BPBD Kabupaten Blora dalam Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(4), 154-174. [KAPASITAS BPBD KABUPATEN BLORA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Elyana | Journal of Public Policy and Management Review \(undip.ac.id\)](#)

Hapsari, A. M., & Djumiarti, T. (2016). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 1004-1015. [PENGEMBANGAN KAPASITAS \(CAPACITY BUILDING\) KELEMBAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \(BPBD\) KABUPATEN JEPARA | Hapsari | Journal of Public Policy and Management Review \(undip.ac.id\)](#)

Manullang, A., & Maesaroh, M. (2019). EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KABUPATEN SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 296-311. [EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \(BPBD\) DI KABUPATEN SEMARANG | Manullang | Journal of Public Policy and Management Review \(undip.ac.id\)](#)

Nunung, A. (2020). Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 8(1), 96-110. [article.php \(kemdikbud.go.id\)](#)

Puri, D. P., & Khaerani, T. R. (2017). Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Purworejo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 51-65. [STRATEGI MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PURWOREJO | Puri | Journal of Public Policy and Management Review \(undip.ac.id\)](#)

Rahman, A. Z. (2017). Kapasitas Daerah Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 1-8. [Kapasitas Daerah Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor | Rahman | JURNAL ILMU SOSIAL \(undip.ac.id\)](#)

Sitorus, Y. L. M., Nurmaningtyas, A. R., Usman, S., & Yanthy, N. O. (2021). Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tolikara. *PEDULI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 98-107. [STUDI OF LOCAL CAPACITY IN DISASTER MANAGEMENT IN TOLIKARA REGENCY | PEDULI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat \(wisnuwardhana.ac.id\)](#)

Surbakti, I. O. B., & Manurung, R. K. P. (2023). Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo Dalam Penanganan Rumah Relokasi Siosar Tahap I. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 61-68. [Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo Dalam Penanganan Rumah Relokasi Siosar Tahap I | Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik \(unived.ac.id\)](#)

Takda, A., Irsan, L. M., Harudu, L., Hidayat, A., Anas, M., & Hastuti, V. (2022). Penguatan kapasitas Desa Batu Ganda dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JAPIMAS)*, 1(1), 5-9. [Penguatan kapasitas Desa Batu Ganda dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat \(JAPIMAS\) \(uho.ac.id\)](#)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Tiap tiap Jabatan Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Dairi